



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Laporan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan



Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Maksud dan Tujuan.....	10
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia.....	12
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya.....	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya.....	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	18
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	25
SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	25
IKU 1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang kawasan dan kesehatan ikan (orang).....	25
SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang direvitalisasi.....	26
IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster).....	26
IKU.3. Kawasan Tambak Udang yang menjadi percontohan (Kawasan).....	29
IKU.4 Kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan).....	31
SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....	32
IKU.5 Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang disalurkan (%).....	32
IKU.6 Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (%).....	36
SS 4. Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan.....	38
IKU 7. Presentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun (%).....	38
IKU 8. Tingkat kualitas implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	40

IKU 9. Indeks serangan penyakit ikan (skala).....	35
IKU 10. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)	38
SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	48
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	48
IKM 12. Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%).....	51
IKM. 13. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	51
IKM.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	43
IKM.15. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%).....	53
IKM.16. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	55
IKM.17. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	56
IKM.18. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%).....	60
IKM.19. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	60
IKM.20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.....	61
BAB IV. PENUTUP.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023	11
Gambar 2. Potensi Perikanan Budi Daya	14
Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024	16
Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024	17
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023.....	18
Gambar 6. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	21
Gambar 7. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023.....	12
Tabel 2. Penyesuaian Indikator Kinerja Pasca Rapat Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023.....	19
Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023.....	22
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan IV Tahun 2023.....	25
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan IV Tahun 2023.....	26
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang menjadi Percontohan (Kawasan) Triwulan IV Tahun 2023	29
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan IV Tahun 2023.....	31
Tabel 8. Rincian target kincir di masing-masing UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	32
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	32
Tabel 10. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Excavator Tahun 2023	33
Tabel 11. Rincian Penerima Bantuan Excavator Triwulan IV Tahun 2023.....	33
Tabel 12. Progres Capaian Bantuan Kincir yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023.....	35
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%) Triwulan IV Tahun 2023	36
Tabel 14. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) Tahun Anggaran 2023.....	36
Tabel 15. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2023.....	38
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan ikan yang disusun (%) Triwulan IV Tahun 2023	39
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	40
Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu Triwulan IV Tahun 2023 di 26Provinsi	44

Tabel 19. Skala Penentuan Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	44
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) Triwulan IV Tahun 2023	45
Tabel 21. Rincian target dan realisasi sampel monitoring penyakit ikan Triwulan IV Tahun 2023 di 34 Provinsi	46
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan IV Tahun 2023	48
Tabel 23. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan IV Tahun 2023 di 15 UPT-DJPB.....	48
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	50
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	51
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)Triwulan IV 2023	52
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	53
Tabel 28. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2023	53
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	54
Tabel 30. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023	55
Tabel 31. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023	57
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan IV Tahun 2023	57
Tabel 33. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023.....	58
Tabel 34. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023	58
Tabel 35. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023	59

Tabel 36. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan IV Tahun 2023.....	59
Tabel 37. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023....	59
Tabel 38. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)Triwulan IV Tahun 2023	60
Tabel 39. Capaian Indikator Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi daya (%) Triwulan IV Tahun 2023.....	61
Tabel 40. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023	62

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2023, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 :

a) Terdapat 15 (lima belas) Indikator kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategi yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SS1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan 1 indikator kinerja, yaitu : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Orang).

SS3. Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi, dengan 1 indikator kinerja, yaitu : Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan / irigasi (Kawasan).

SS4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan, dengan 2 indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (%) dan (2) Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%).

SS5. Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan, dengan 4 indikator kinerja, yaitu: (1) Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%), (2) Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%), (3) Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) dan (4) Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%).

SS6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu : (1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen), (2) Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (3) Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (4) Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (5) Persentase layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (6) Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya KUSUKA (%) dan (7) Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

- b) Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategi yang capaiannya sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan, yaitu:
- SS1. **Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi**, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) dan (2) Kawasan Budi Daya Udang yang menjadi Percontohan (Kawasan).
 - SS5. **Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan** dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%).
- c) Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya di bawah target tahunan yang ditetapkan, yaitu:
- SS5. **Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan** dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 75% Indikator Kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, 5% di bawah target yang ditetapkan dan 20% Indikator Kinerja yang capaiannya sama dengan target. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023, upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyesuaian dalam mendorong pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)**, telah dilaksanakannya penyelesaian pekerjaan konstruksi tambak, pemasangan instalasi listrik, bangunan pendukung, peralatan produksi, penebaran benih serta monitoring dan evaluasi proses budi daya;
2. **IKU.3 Kawasan Budi daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan)**, telah diselesaikannya Berita Acara Serah Terima pekerjaan PHO (Provisional Hand Over) pada pekerjaan BUBK tahap II paket 1 serta pelaksanaan progres pekerjaan paket 2.
3. **IKU.5 Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%)**, telah dilakukan komunikasi dengan calon penerima, dinas perikanan dan penyuluh terkait dengan permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan kelengkapan usulan .
4. **IKU 6. Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (%)**, melaksanakan monitoring dan evaluasi PITAP;
5. **IKU 7. Persentase NSPK bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)**, telah disampaikan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diproses lebih lanjut dan penyelesaian dokumen NSPK lainnya;
6. **IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) (%)**, telah dilakukan evaluasi pelaksanaan monitoring residu di 26 Provinsi;
7. **IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)**, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan monitoring penyakit ikan di 34 Provinsi.
8. **IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)**, telah dilaksanakan surveilan AMR yang selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap bakteri target.

9. **IKM 12.** Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), telah dilakukan penyelesaian temuan LHP BPK TA 2022 dengan nilai Rp 3.601.915.382 atau 100%.
10. **IKM 16.** Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), telah dimanfaatkannya bantuan pemerintah tahun 2022 berupa Excavator, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dan Kincir.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020 - 2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan target kinerja tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kawasan

dan Kesehatan Ikan tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

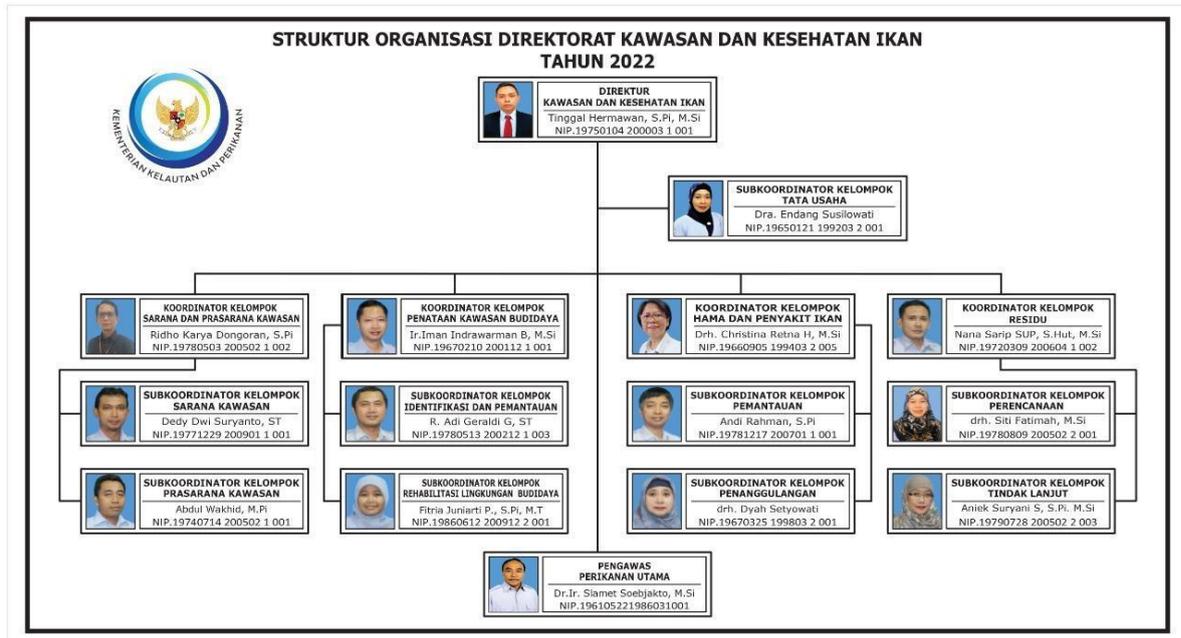
1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, maka Tugas Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan setelah adanya transformasi jabatan fungsional yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023

No.	Nama Organisasi	Jenjang PendidikanT						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	1
2	Kelompok Sarana Prasarana Kawasan	-	1	9	-	-	-	10
3	Kelompok Penataan Kawasan	-	2	8	-	-	-	10
4	Kelompok Hama dan Penyakit Ikan	-	2	6	-	-	-	8
5	Kelompok Residu	-	3	5		-	-	8
6	Bidang Tata Usaha	-	-	10	1	1	1	13
7	Pengawas Perikanan Utama	1	-	-	-	-	-	1
J U M L A H		1	9	38	1	1	1	51

Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencapai 51 orang, dengan rincian sebagai berikut:

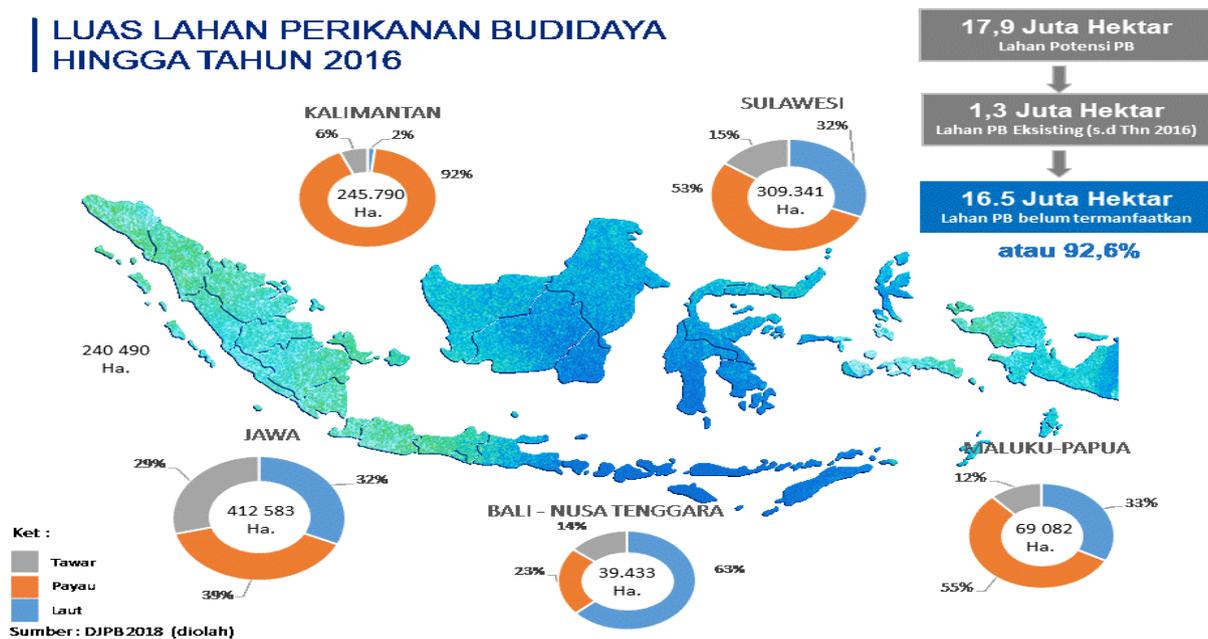
- a. Pegawai Negeri Sipil 40 orang, dan
- b. Pegawai Tenaga Kontrak 12 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tersebar di ketatausahaan 5 (lima) orang, bidang Sarana dan Prasarana Kawasan 3 (tiga) orang, bidang Residu 1 (satu) orang dan bidang Penataan Kawasan 3 (tiga) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

LUAS LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA HINGGA TAHUN 2016



Gambar 2. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

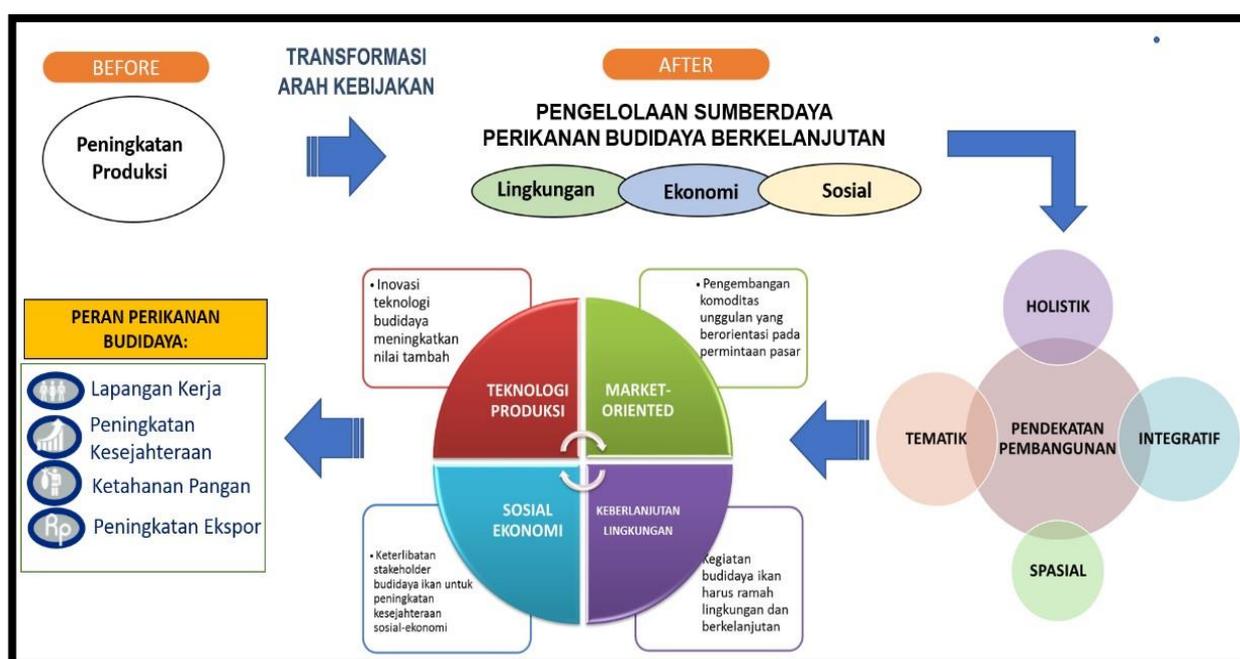
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 selama kurun waktu Oktober – Desember 2023,
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2023. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut

kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada gambar 5.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
 Jabatan : **Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
 Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatkan Perikanan Budi Daya Mengingat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1. Mengekspansi jangkauan terlembag di bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	1.872
	2. Jumlah Tambak yang siap Operasional (Persen)	13
	3. Kawasan Budi Daya Unggul yang Menjadi Percontohan (Kawasan)	1
	4. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Rekomendasi Pengantar Ujicoba (Persen)	23
3. Meningkatkan Service dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	5. Peningkatan service Service Kawasan Budi Daya yang (Kawasan) (Persen)	75
	6. Peningkatan Service Unggul Tambak yang Diwawabakan (Persen)	80
4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Kawasan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi Nasional RASUKA Monitoring Data (NIMDI) (Persen)	94
	8. Peningkatan Indeks Bidang Kesehatan Ikan yang Diukur (Persen)	71
	9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Persen)	2
	10. Peningkatan Indeks Perikanan (Persen) yang (Persen)	25
5. Tesis Nelayan Percontohan yang Baik di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Indeks Percontohan KAP (Persen) Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	81
	12. Peningkatan Peningkatan LHP (Persen) Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	100
	13. Tesis Percontohan (Persen) (Persen) (Persen) (Persen)	75
	14. Peningkatan Peningkatan (Persen) (Persen) (Persen) (Persen)	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. (Persen)	
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	92
	16. Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	77,5
	17. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85
	18. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	19. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	98

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
 Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Direktorat kawasan dan Kesehatan Ikan mengalami penyesuaian di beberapa Indikator Kinerja, pasca Rapat Pra Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen. Perikanan Budi Daya dengan validator dari Biro Perencanaan KKP dan Biro SDMAO KKP, pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023 yang bertempat Ruang Rapat BPKIL Serang.

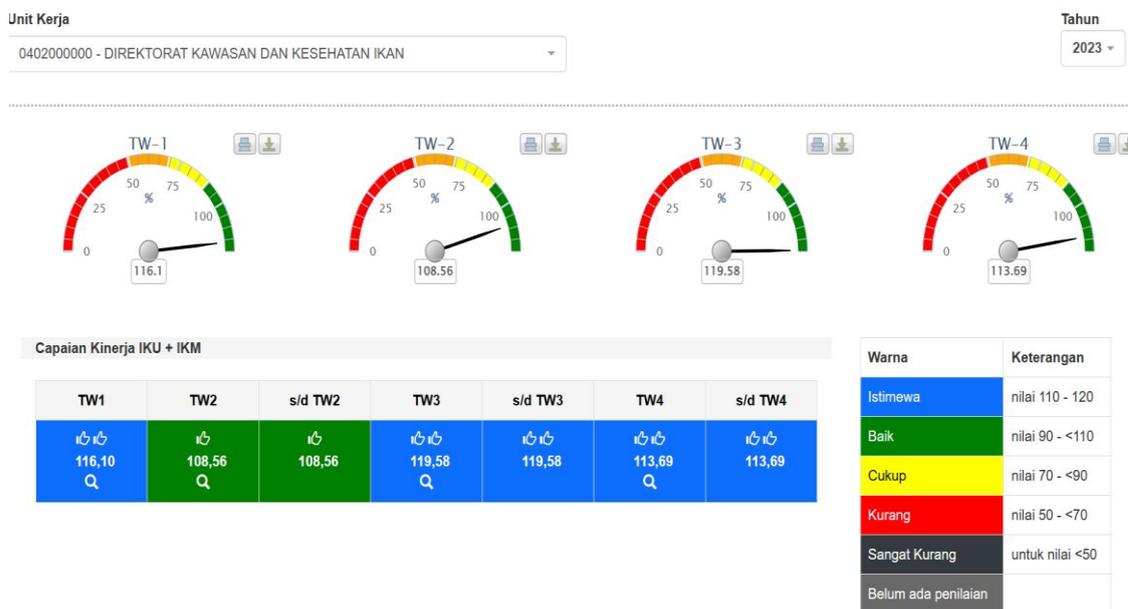
Selanjutnya, penyesuaian Indikator Kinerja Manajerial dilakukan sesuai dengan yang diinformasikan di dalam Nota Dinas Nomor : 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, 1 November 2023 mengenai Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial Tahun 2024. Penyesuaian yang dimaksud mencakup perubahan nama Indikator kinerja dan terbentuknya Indikator Kinerja yang baru, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rangkuman Penyesuaian Indikator Kinerja Pasca Rapat Validasi Tim kerja Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

No	Nama Indikator Kinerja	
	Sebelum	Menjadi
1	Percontohan Budi daya Udang Berbasis Kawasan (kawasan)	Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan)
2	Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (%)	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang Disalurkan (Persen)
3	Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%)	Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Persen)
4	Persentase sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji (%)	Dihapus
5	Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%)	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (Persen)
6	Tidak ada	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (Persen)
7	Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)
8	Persentase sampel ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (Persen)
9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 6. Schreenshoot NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerjaku Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan kawasan dan kesehatan ikan pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya pada akhir tahun, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 6 (enam) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan selama Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Peng-Hitungan
1	Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)	1.872	3.202	>120	Tahunan
2	Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi	2	Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	13	13	100	Tahunan
		3	Kawasan Budi Daya Udang yang menjadi Percontohan (Kawasan)	1	1	100	Tahunan
		4	Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan)	23	35	>120	Tahunan
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang Disalurkan (%)	75	98.50	>120	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Peng-Hitungan
		6	Persentase saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (%)	80	100	>120	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas pengendalian Kesehatan Ikan	7	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (%)	94	95,05	101,12	Tahunan
		8	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)	71	83	116,90	Tahunan
		9	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2	3	>120	Tahunan
		10	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)	35	14,33	>120	Tahunan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	81	83,07	102,56	Semesteran
		12	Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	100	100	100	Tahunan
		13	Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	75	58,05	77,40	Tahunan
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	75	100	>120	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Peng-Hitungan
		15	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	92	133.33	>120	Triwulan
		16	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	77.5	94.83	>120	Tahunan
		17	Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	85	94.13	110.74	Triwulan
		18	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	80	123.51	>120	Tahunan
		19	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	100	100	100	Tahunan
		20	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	98	99.42	101.45	Triwulan

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) merupakan IKU yang baru ditetapkan mulai tahun 2022, IKU tersebut didefinisikan Jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan kawasan dan kesehatan ikan yang meliputi: Excavator sebanyak 620 orang; (b) PITAP sebanyak 1.100 orang; dan (c) *Shrimp estate* sebanyak 152 orang. Penanggung Jawab Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) berada di Kelompok Sarana dan Prasarana dan Penataan Kawasan. Pengukuran penghitungan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) dihitung berdasarkan tenaga Kerja yang terlibat langsung pada kegiatan di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang), dengan kriteria sebagai berikut:

- Dalam mengoperasikan 1 unit excavator membutuhkan 10 orang tenaga kerja langsung yang terdiri dari 3 orang pengelola dari kelompok, 1 orang operator, 1 orang mekanik, 2 orang pembantu operator, 1 orang pembantu mekanik, dan 2 orang penjaga malam. Sehingga untuk 62 unit excavator melibatkan tenaga kerja sebanyak 620 orang (62 unit x 10 orang). Untuk pengelola, operator, pembantu operator dan penjaga malam bekerja selama alat beroperasi, sedangkan mekanik dan pembantu mekanik bekerja saat excavator sedang di service/perbaikan.
- 1 paket PITAP melibatkan kelompok dimana 1 kelompok minimal terdiri dari 20 orang. Sehingga untuk 55 paket PITAP melibatkan tenaga kerja sebanyak 1.100 orang (55 paket x 20 orang).
- Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan *shrimp estate* terdiri dari tenaga kerja administrasi dan tenaga kerja lapangan sebanyak 152 orang.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Tahun 2023

Nama SS : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020 - 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
1.872	3.202	>120	12.592	25.43	-	1.872	>120	-

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah tenaga kerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dipengaruhi lingkup kegiatan tahun 2023 lebih sempit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu beberapa kegiatan seperti kegiatan dredger, rehabilitasi saluran tambak, kincir, pompa air, mesin pakan, sarana UPR dan peralatan laboratorium tidak berlanjut di Tahun 2023. Hingga akhir tahun 2023, capaian Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang), meliputi:

- Realisasi tenaga kerja yang terlibat dalam pemanfaatan PITAP (Orang) sampai dengan triwulan IV mencapai 109,90 %, yaitu sebanyak 1200 orang dari target sebanyak 1100 orang;
- Realisasi tenaga kerja yang terlibat dalam bantuan excavator sebanyak 620 orang dengan asumsi masing-masing unit excavator menyerap 10 orang tenaga kerja;
- Realisasi kegiatan *shrimp estate* dalam hal ini Tenaga Kerja yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan) di bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (orang) sejumlah 1.382 orang yang terdiri dari : 162 orang pekerja lapangan yang merupakan pekerja dari PT. Adhi Karya selaku pelaksana dari pembangunan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan Tahap II. Disamping itu, tenaga kerja lainnya yang terlibat sebanyak 1.220 orang hari sebagai tenaga kerja harian/lepas saat panen.

SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)

Indikator kinerja kluster tambak yang siap operasional merupakan indikator kinerja baru tahun 2023 yang terdiri dari : (a) pembangunan kluster tambak udang, dengan target 8 kluster dan (b) revitalisasi kluster tambak bandeng, dengan target 5 kluster. Jumlah usaha budi daya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak 13 kluster (8 kluster tambak udang dan 5 kluster tambak bandeng) dikerjakan oleh UPT DJPB: (a) BPBAP Situbondo: 2 tambak udang dan 2 tambak bandeng; (b) BBPBAP Jepara: 3 tambak udang dan 1 tambak bandeng; (c) BPBAP Takalar: 2 tambak udang dan 1 tambak bandeng; dan (d) BPBAP Ujung Batee: 1 tambak udang dan 1 tambak bandeng.

Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budi daya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining). Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng dengan penyiapan lahan untuk siap ditebar benih. Penghitungan capaian Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah kluster tambak udang dan bandeng siap operasional merujuk pada definisi siap operasional. Pembina Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) berada di Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru sebagai komponen pembentuk dari indikator kinerja Eselon I yaitu Percontohan pengelolaan kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Tahun 2023

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
13	13	100	15	86.67	-	13	13	100

Capaian Indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) merupakan IKU baru sehingga pencapaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, capaian IKU tersebut baru dapat diketahui pada akhir tahun sesuai dengan sifat penghitungan IKU revitalisasi tambak udang. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator diatas pada triwulan IV tahun 2023, yaitu :

A. Kluster Tambak Udang

1. BBPBAP Jepara :

- Paket kluster udang Muna Sulawesi Tenggara proses pembangunan kluster yang terdiri dari kontruksi tambak dan bangunan pendukung telah mencapai 100% di bulan desember, dan telah dilakukan penebaran benih dan dilanjutkan oleh proses budidaya.
- Paket kluster udang Lampung Timur sudah terealisasi 100% di bulan Desember baik pembangunan kontruksi tambak, pemasangan instalasi listrik, dan penebaran benih dilakukan bulan Desember dilanjutkan oleh proses budi daya.

2. BPBAP Situbondo :

- Kluster Sumbawa telah selesai dilaksanakan dengan baik kontruksi tambak, pemasangan instalasi listrik dan peralatan produksi. Dan telah dilakukan penebaran di bulan Desember dan dilanjutkan oleh proses budi daya.
- Melaksanakan kegiatan kontruksi tambak dan monitoring progres pekerjaan kontruksi dan pendampingan teknis produksi budi daya.

3. BPBAP Ujung Batee :

- Dalam Pekerjaan Swakelola tipe I, Pekerjaan kontruksi telah dilakukan dengan baik dan sudah dilakukan penebaran pada bulan desember dilanjutkan oleh proses budi daya.

4. BPBAP Takalar :

- Untuk Kluster udang Kab. Morowali Utara baik kontruksi tambak, pemasangan instalasi listrik, peralatan kincir, pompa telah selesai dilaksanakan 100% dan dilakukan telah dilakukan penebaran di bulan Desember dilanjutkan oleh monitoring dan evaluasi proses budi daya.
- Kluster udang Kab.Mamuju telah selesai dilaksanakan dengan baik dan telah dilakukan penebaran di bulan Desember dan dilanjutkan oleh monitoring dan evaluasi terhadap proses budidaya.

B. Kluster Tambak Bandeng : UPT Pelaksana pembangunan kluster tambak bandeng melakukan monitoring dan evaluasi proses budi daya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap pencapaian kluster udang dan bandeng, antara lain :

Kluster Udang

- Capaian pada TW IV dari rencana kluster udang 8 kluster terealisasi 100%, adapun kendala yang dihadapi di lapangan yaitu cuaca ekstrim di beberapa daerah kluster menyebabkan kendala dalam percepatan pembangunan konstruksi tambak. Cuaca juga menjadi perhatian dalam proses penebaran yang dilakukan. Sehingga diharapkan pelaksanaan kluster di tahun depan pengaturan waktu pelaksanaan kluster juga memperhatikan kondisi cuaca, untuk memitigasi kegagalan panen dan keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi tambak.
- Proses pemilihan kelompok (CPCL), clean dan clear lahan juga menjadi perhatian khusus dalam proses verifikasi di lapangan untuk memitigasi konflik dan kesalahan perencanaan pembangunan.

Kluster Bandeng

- Capaian pada TW IV dari rencana kluster bandeng sebanyak 5 kluster terealisasi 100% adapun kluster bandeng relatif tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pelaksanaan kegiatan.

IKU.3 Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan)

Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan) merupakan upaya peningkatan produktivitas lahan budi daya udang berbasis kawasan melalui pengelolaan tambak udang yang terintegrasi dalam satu kawasan tertentu. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah kawasan percontohan budi daya udang yang terbentuk dengan target sebanyak 1 (satu) kawasan dan berlokasi di Kabupaten Kebumen. Indikator kinerja Kawasan Budi Daya yang menjadi Percontohan (kawasan) merupakan komponen pembentuk dari indikator kinerja Eselon I yaitu Percontohan pengelolaan kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan. Penanggung jawab kegiatan Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang menjadi Percontohan berada di Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan) Tahun 2023

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
1	1	100	10	1000	-	1	0	-

Berdasarkan Renja DJPB 2022, bahwa IKU Kawasan Budi Daya Udang yang menjadi Percontohan (kawasan) merupakan komponen pendukung Indikator Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan yang telah dimuat di dalam Renstra DJPB. Capaian IKU Kawasan Budi Daya Udang yang Menjadi Percontohan (Kawasan) baru dapat diukur pada akhir tahun, dengan cakupan progres kegiatan budi daya udang berbasis Kawasan meliputi :

1. Pekerjaan kontrak paket 1 Nomor : 2924/DJPB.2/K/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 dengan pelaksana pekerjaan PT. Adhi Karya, telah dilakukan 2 kali addendum yaitu :
 - Adendum pertama Nomor : 5165/DJPB.2/K/VI/2023. Tanggal 12 Juni 2023 dengan pekerjaan yang diadendum berupa: masa pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula 150 hari hari kalender menjadi 2180 hari kalender.
 - Adendum kedua Nomor : 8106/DJPB.2/K/IX/2023, tanggal 05 September 2023 dengan pekerjaan yang diadendum berupa : tambah kurang item pekerjaan.
2. Pekerjaan kontrak paket 2 Nomor: 4304/DJPB.2/K/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dengan pelaksana pekerjaan PT. Adhi Karya, telah dilakukan 2 kali addendum yaitu:
 - Adendum pertama Nomor : 6453/DJPB.2/K/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 dengan pekerjaan yang diadendum berupa: perubahan item pekerjaan menjadi pekerjaan konstruksi bangunan area kantor, pekerjaan mekanikal elektrika, dan pekerjaan sarana pendukung intake laut. Serta masa pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula 150 hari hari kalender menjadi 214 hari kalender.
 - Adendum kedua Nomor: 8107/DJPB.2/K/IX/2023, tanggal 05 September 2023 dengan pekerjaan yang diadendum berupa: penambahan volume dan nilai pekerjaan.
 - Adendum ketiga Nomor : 10978/DJPB.2/K/XI/2023 dengan pekerjaan tambah kurang.

Hasil yang telah dicapai pada triwulan IV yakni Berita Acara Serah Terima pekerjaan PHO (*Provisional Hand Over*) pada pekerjaan BUBK tahap II paket 1 serta pelaksanaan progres pekerjaan paket 2 telah mencapai 100%. PHO dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Item pekerjaan paket 2 tersebut meliputi pekerjaan sarana pendukung intake laut, pekerjaan konstruksi bangunan area kantor (penanganan abrasi), dan pekerjaan mekanikal elektrik (ME). Selain itu upaya yang sudah dilaksanakan melakukan koordinasi antara PPK, Tim satgas, Itjen, PT. Adhi Karya dan PT. Yodya Karya terhadap penanganan intake air laut dan penanganan abrasi.

Rekomendasi pelaksanaan kegiatan BUBK Kebumen :

- Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap lingkungan terkait dengan Budi daya Udang Berbasis Kawasan yang berkelanjutan.
- Terkait dengan kondisi lingkungan tentunya harus di mitigasi siklus bencana di kawasan BUBK Kebumen.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil produksi.

Pagu anggaran pembangunan Budi daya Udang Berbasis Kawasan sebesar Rp 76.458.045.000 dengan terealisasi sebesar Rp 76.458.045.00 atau 99.99%, selanjutnya realisasi fisik sebesar 65%.

IK.4 Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)

Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020). Indikator kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi merupakan indikator baru yang dibentuk tahun 2023 sebagai komponen pembentuk indikator kinerja Eselon I yaitu Percontohan Pengelolaan Klaster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP dengan target 23 kawasan. Penanggung jawab Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) berada di Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Tahun 2023

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
23	35	>120	-	-	-	23	-	>120

Cara pengukuran yang dilakukan dengan menghitung jumlah Kawasan perikanan budi daya yang memiliki kemudahan pengairan setelah pekerjaan PITAP. Selanjutnya, capaian indikator kinerja tersebut baru dapat diketahui setelah pekerjaan PITAP telah selesai dilaksanakan.

Realisasi Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) sampai dengan triwulan IV mencapai 152,17 %, yaitu sebanyak 35 kawasan dari target sebanyak 23 kawasan. Hingga akhir triwulan IV, IKU Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1,736,724,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,734,993,750 atau 99,90 %.

SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU.5 Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%)

Indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%) merupakan alat berat excavator dan kincir yang disalurkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan sehingga dapat meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%) sebesar 75% yang diukur pada akhir tahun. Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase realisasi bantuan sarana kawasan budi daya dibandingkan dengan target bantuan.

Jumlah bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan berjumlah 732 unit terdiri dari excavator berjumlah 62 unit dan kincir berjumlah 670 unit. Pencapaian indikator sarana kawasan budidaya yang disalurkan berupa excavator menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya sedangkan bantuan kincir dikerjakan di 5 (lima) UPT DJPB, yaitu: BPBAP Ujung Batee, BLUPPB Karawang, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo dan BPBAP Takalar. Berikut rincian target kincir dimasing-masing UPT Ditjen Perikanan Budi Daya.

Tabel 8. Rincian target kincir dimasing-masing UPT DJPB Tahun 2023

No	UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Kincir (Unit)
1	BPBAP Ujung Batee	180
2	BLUPPB Karawang	110
3	BBPBAP Jepara	150
4	BPBAP Situbondo	120
5	BPBAP Takalar	110
Total (unit)		670

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang disalurkan (%) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
75	98,50	>120	-		-	75	>120	>120

Tabel 10. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang disalurkan (%) Tahun 2023

No	Bantuan Sarana Bantuan yang Disalurkan	Target Triwulan IV (Unit)	Realisasi Triwulan IV (Unit)	Persentase (%)
1	Excavator	62	64	98.50
2	Kincir	670	657	
	TOTAL	732	721	

Di dalam Renstra DJPB 2020 – 2024 telah memuat jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budi daya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (unit) dengan target 110 unit, yang salah satunya merupakan kegiatan alat berat mendukung revitalisasi kawasan tambak. Renja tahun 2022 juga telah menyebutkan alat berat sebagai komponen mencapai Rincian Output (RO) sarana kawasan dan kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat.

Pada triwulan IV tahun 2022 bahwa realisasi pencapaian alat berat berupa excavator telah terealisasi sebanyak 7 unit, akan tetapi capaian Indikator kinerja Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%), tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dikarenakan adanya perbedaan cara pengukuran terhadap indikator tersebut. Capaian bantuan sarana budi daya berupa kincir triwulan IV tahun 2022 tercapai sebanyak 1.364 unit dengan capaian triwulan IV 2023 juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan cara pengukuran yang berbeda.

Excavator

Tahapan realisasi bantuan excavator yang disalurkan ke masyarakat dimulai dari pembuatan draft petunjuk teknis, usulan, verifikasi, penetapan, pengadaan dan distribusi. Jumlah bantuan excavator yang akan disalurkan kepada masyarakat adalah sebanyak 64 unit dengan rincian kemajuan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 11. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Excavator Tahun 2023

No.	Tahapan	Jumlah
1	Data CPCL yang diterima	64 kelompok
2	Sudah diverifikasi	67 kelompok
3	Sudah ditetapkan	64 kelompok
4	Excavator sudah sampai	64 unit

Tabel 12. Rincian Penerima Bantuan Excavator Tahun 2023

No.	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Nama Kelompok
1	Aceh	1	Aceh Utara	1	Koperasi Tunas Ban Timoeh Jaya
2	Aceh	2	Aceh Tenggara	1	Pokdakan Bersama
3	Banten	3	Lebak	1	Pondok Pesantren Qothrotul Falah
4	Jawa Barat	4	Bekasi	1	Kelompok Tani Tambak Sederhana Mandiri
		5	Bogor	1	Tunas Muda Mandiri
		6	Cianjur	1	Koperasi Pantai Cioleng Bahari
				1	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Mandiri
		7	Cirebon	1	Kelompok Subur Jaya Makmur
		8	Garut	1	KUB Aman Jaya Abadi
		9	Indramayu	1	Koperasi Produsen Garam Inti Rakyat
				1	Pokdakan Tambak Blok Kalbar
		10	Pangandaran	1	Pokdakan Mitra Bahari Lebak Sari
		11	Subang	1	Saluyu
12	Sukabumi	1	Pokdakan Sabanda Sariksa		
13	Tasikmalaya	1	Yayasan An-Nur Ciheras		
5	Jawa Tengah	14	Blora	1	Pokdakan Sido Dadi
		15	Brebes	1	Pokdakan Kajoran Makmur
		16	Cilacap	1	Koperasi Adiluhung Bebatian Rahayu
				1	Pokdakan Armada
		17	Kebumen	1	Pokdakan Mina Lou Han
				1	Pokdakan Nila Sari
		18	Klaten	1	Pokdakan Ornamen Alam Hayati
		19	Kudus	1	Pokdakan Tirta Mina Muria
20	Pati	1	Pokdakan Mina Bahari Pantai Kertomulyo		
6	Jawa Timur	21	Kediri	1	Pokdakan Keluarga Ikan Hias Canggung Kediri
		22	Trenggalek	1	Yayasan Pendidikan Islam Al-Irsyad
		23	Bangkalan	1	Pokdakan Pantura
		24	Sidoarjo	1	Pokdakan Samudera Hijau III
		25	Kota Blitar	1	Pokdakan Sekar Tanjung

No.	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Nama Kelompok
7	Kalimantan Barat	26	Kubu Raya	1	Kelompok Daya Guna
		27	Melawi	1	Kelompok Milenial Sejati
8	Kalimantan Tengah	28	Kotawaringin Barat	1	Pokdakan Indah Jaya
9	Kalimantan Timur	29	Penajam Paser Utara	1	Pokdakan Haruan Jaya
10	Kepulauan Riau	30	Bintan	1	Koperasi Tunas Jaya
		31	Lingga	1	Koperasi Konsumen Nelayan Sejahtera Sehati
11	Lampung	32	Lampung Utara	1	Pokdakan Skipi Makmur Mandiri Jaya
		33	Lampung Barat	1	Pokdakan Sinar Semining Jaya
		34	Lampung Timur	1	Pokdakan Pujian Sari Bina Mandiri
		35	Tulang Bawang	1	Pokdakan Setia Usaha
12	Maluku	36	Seram Bagian Barat	1	Pokdakan Mina Muda
		37	Buru	1	Pokdakan Parbulu Maju
		38	Maluku Tengah	1	Koperasi Produsen Nelayan Pantai Ina Marina
13	Maluku Utara	39	Kepulauan Sula	1	Koperasi Nelayan Bajo Sejahtera
14	Nusa Tenggara Barat	40	Dompu	1	Pokdakan Nanga Naro
		41	Sumbawa	1	Pokdakan Suka Maju
				1	Pokdakan Rapang Jaya Bersatu
15	Nusa Tenggara Timur	42	Ende	1	Nuamuri Ndawilima
		43	Timor Tengah Selatan	1	Pokdakan Air Tawar Musafa Indah
		44	Kota Kupang	1	KUB El Shaddai
16	Papua	45	Kota Jayapura	1	Koperasi Perikanan Tami Jaya Abadi
17	Sulawesi Barat	46	Mamuju	1	Pokdakan Salutalawar Mandiri
18	Sulawesi Selatan	47	Pinrang	1	Latamma
		48	Bantaeng	1	Pokdakan Osonga
19	Sulawesi Tenggara	49	Konawe Selatan	1	Koperasi Purnama Jaya Mandiri
				1	Koperasi Nur Rezki Hidayah
20	Sulawesi Utara	50	Minahasa Tenggara	1	Kokor Farm
21	Sumatera Barat	51	Solok Selatan	1	Koperasi Produsen Anugerah Kampung Tengah
		52	Padang Pariaman	1	Pokdakan Surya Gemilang
22	Sumatera Selatan	53	Banyuasin	1	Pokdakan Tunas Muda
		54	Penukal Abab Lematang Ilir	1	Pokdakan Mudah Serasan
		55	Musi Rawas	1	Koperasi Perikanan Gulepanis Mura
23	Sumatera Utara	56	Asahan	1	Kelompok Tani Huta Hita Desa Sei Sembilang
		57	Serdang Bedagai	1	Kelompok Sukajadi Makmur

No.	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Nama Kelompok
		58	Batubara	1	Pokdakan Rimbun Jaya
			TOTAL	64	

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini pada umumnya terkait waktu yang dibutuhkan oleh calon penerima untuk memenuhi usulan lebih lama dan terkadang respon yang kurang cepat. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, sudah dilakukan komunikasi kepada calon penerima, dinas perikanan dan penyuluh. Komunikasi dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok terkait kelengkapan usulan dan solusi yang dapat dilaksanakan.

Realisasi anggaran bantuan excavator sebesar 99,46% dari pagu Rp. 83.758.200.000 atau sebesar Rp. 83.309.037.300, sedangkan realisasi fisik tercapai 64 unit dari target 62 unit yang disalurkan atau 103,23%.

Kincir

Realisasi jumlah bantuan kincir sampai dengan Triwulan IV sebanyak 657 unit atau 98,06% dari target tahunan dan semua bantuan kincir telah sampai ke kelompok penerima bantuan. Secara lebih rinci, progres kincir sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. BPBAP Ujung Batee: 180 unit sudah terdistribusi, terdiri dari 170 unit aspirasi dan 10 unit reguler;
2. BBPBAP Jepara: 150 unit sudah terdistribusi (semua aspirasi);
3. BPBAP Situbondo: 120 unit sudah terdistribusi, terdiri dari 70 unit aspirasi dan 50 unit reguler;
4. BPBAP Takalar: 97 unit sudah terdistribusi, terdiri dari 57 unit aspirasi dan 40 unit reguler;
5. BLUPPB Karawang: 110 unit sudah terdistribusi, terdiri dari 95 unit aspirasi dan 15 unit reguler.

Tabel 13. Progress Capaian Bantuan Kincir yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2023

No	UPT Pelaksana	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Keterangan
1	Ujung Batee	180	180	170 unit aspirasi dan 10 unit reguler.
2	Karawang	110	110	95 unit aspirasi dan 15 unit reguler.
3	Jepara	150	150	150 unit aspirasi.
4	Situbondo	120	120	70 unit aspirasi dan 50 unit reguler.
5	Takalar	110	97	57 unit aspirasi dan 40 unit reguler
TOTAL		670	657	

Permasalahan dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain:

1. Terdapat beberapa anggota dewan yang tidak mengusulkan; dan
2. Tidak tercapainya 100% penyaluran bantuan kincir dikarenakan adanya perbedaan harga kincir di lapangan dengan di RKA-K/L, sehingga jumlah kincir yang disalurkan tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain :

1. Mencari pengganti penerima bantuan dari kelompok lain (reguler); dan
2. Lebih cermat lagi dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya (untuk UPT Pelaksana).

Anggaran kincir seluruhnya ada di UPT Penanggungjawab, sehingga di satuan kerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tidak terdapat realisasi anggaran kincir.

IKU.6 Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (%)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (%) sebesar 80% dengan jumlah saluran yang dibangun sebanyak 55 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase jumlah usulan yang terealisasi dibandingkan dengan jumlah usulan yang diverifikasi. Sumber data pencapaian indikator kinerja tersebut berasal dari Tim kerja Prasarana Kawasan Budi daya.

Tabel 14. Capaian Indikator Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	100	>120	65	-	-	80	>120	-

Pelaksanaan kegiatan fisik telah dilaksanakan pada bulan September, yaitu rehabilitasi saluran tambak berupa penggalian tanah yaitu sebesar 100 %. Kontrak kegiatan PITAP selesai pada tanggal 31 Juli 2023. Realisasi panjang saluran yang telah direhabilitasi yaitu 77,834.75 m' dengan luas lahan tambak yang terairi sebesar 3,891.74 Ha. Hasil pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2023

No	Provinsi	Kabupaten	Poklina	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Panjang Saluran Realisasi (m)	Luas Terairi (ha)
1	Aceh	Aceh Utara	Bina Tambak	1	180,000,000	1,525	76
			Sejahtera Bersama	4	720,000,000	5,525	276
		Aceh Timur	Aneuk Ranto	1	180,000,000	1,223	61
		Pidie Jaya	Alue Mangrove	1	180,000,000	1,567.20	78
2	Sumatera Utara	Langkat	Kuda Laut Biru	1	180,000,000	1,368.61	68
			Paluh Tiram Sejahtera	1	180,000,000	928	46
3	Lampung	Lampung Timur	Tambak Jaya	3	540,000,000	3,920	196
			Windu Karya	3	540,000,000	3,975	199
4	Banten	Serang	Muara Bakau	2	360,000,000	2,900	145
5	Jawa Barat	Bekasi	Jaya Makmur	1	180,000,000	1,600	80
			Harmoni	2	360,000,000	3,150	158
		Karawang	Mina Karya	1	180,000,000	1,540	77
			Anugrah Sejahtera	2	360,000,000	2,920	146
			Ciparage	1	180,000,000	1,450	73
			Pesona Tambak	1	180,000,000	1,370	69
		Indramayu	Talang Karang Song	2	360,000,000	2,210.56	111
			Wana Jaya Wanantara	2	360,000,000	1,746.60	87
6	Jawa Tengah	Brebes	Padeon	1	180,000,000	2,259	113
			Bina Mandiri	1	180,000,000	2,605	130
			Harapan Jaya	1	180,000,000	2,199	110
			Mina Intan	1	180,000,000	2,240	112
			Mina Sumber Makmur	2	360,000,000	4,309	215
		Pemalang	Mitra Sejahtera	1	180,000,000	980	49
			Lestari Jaya	1	180,000,000	2,130	107
		Kendal	Tirta Unggul	1	180,000,000	2199.31	110
Banyu Panguripan	2		360,000,000	3,553	178		
7	Jawa Timur	Gresik	Beta Suci	1	180,000,000	1,400	70
			Gotong Royong	2	360,000,000	1,980	99
			Rukun Bersama	1	180,000,000	1,400	70

			Tirta Mina	1	180,000,000	1,840	92
8	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Padak Tui	1	180,000,000	1,385	69
			Gemilang	1	180,000,000	1,305	65
			Sipakamaju	3	540,000,000	2,397.26	120
9	Sulawesi Selatan	Pinrang	Lao Tapada Mamminanga	3	540,000,000	2,464.21	123
			Harapan Kita	1	180,000,000	1,250	63
10	Sulawesi Tenggara	Kaolaka Utara					
11	Sulawesi Barat	Donggala	Bersatu	1	180,000,000	1,020	51
Jumlah				55	9,900,000,000	77,834.75	3,891.74

Pada saat ini telah dibuat BAST sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh POKLINA, yaitu Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan dari POKLINA ke PPK dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari PPK kepada KPA. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan telah tercapainya rehabilitasi saluran irigasi, yaitu proses penandatanganan BAST KPB ke Poklina serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PITAP.

Tabel 16. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari PPK kepada KPA

Nama kab./kota	Nama Poklina	No. BAST
Aceh Utara	Bina Tambak	7258.1/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Aceh Utara	Sejahtera Bersama	7258.2/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Aceh Timur	Aneuk Ranto	7258.3/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Pidie Jaya	Alue Mangrove	7258.4/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Langkat	Kuda Laut Biru	7258.5/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Langkat	Paluh Tiram Sejahtera	7258.6/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Lampung Timur	Tambak Jaya	7258.7/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Lampung Timur	Windu Karya	7258.8/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Serang	Muara Bakau	7258.9/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Bekasi	Jaya Makmur	7258.10/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Bekasi	Harmoni	7258.11/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Karawang	Mina Karya	7258.12/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Karawang	Anugrah Sejahtera	7258.13/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Karawang	Ciparage	7258.14/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Karawang	Pesona Tambak	7258.15/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Indramayu	Talang Karang Song	7258.16/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Indramayu	Wana Jaya Wanantara	7258.17/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Brebes	Padeon	7258.18/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Brebes	Bina Mandiri	7258.19/DJPB.2/BAST/VIII/2023

Nama kab./kota	Nama Poklina	No. BAST
Brebes	Harapan Jaya	7258.20/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Brebes	Mina Intan	7258.21/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Brebes	Mina Sumber Makmur	7258.22/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Pemalang	Mitra Sejahtera	7258.23/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Pemalang	Lestari Jaya	7258.24/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Kendal	Tirta Unggul	7258.25/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Kendal	Banyu Panguripan	7258.26/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Gresik	Beta Suci	7258.27/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Gresik	Gotong Royong	7258.28/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Gresik	Rukun Bersama	7258.29/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Gresik	Tirta Mina	7258.30/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Sumbawa	Padak Tui	7258.31/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Sumbawa	Gemilang	7258.32/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Pinrang	Sipakamaju	7258.33/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Pinrang	Lao Tapada Mamminanga	7258.34/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Kaolaka Utara	Harapan Kita	7258.35/DJPB.2/BAST/VIII/2023
Donggala	Bersatu	7258.36/DJPB.2/BAST/VIII/2023

Hingga akhir triwulan IV, IKU Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi(Kawasan) **termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1,736,724,000** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,734,993,750 atau 99,90 %.

S.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)

Indikator kinerja NSPK bidang Kesehatan Ikan merupakan dokumen NSPK yang disusun oleh Tim Kerja NRMP dan NSPK yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia, Prosedur Operasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. NSPK di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu NSPK di bidang residu dan bidang penyakit ikan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru dimunculkan pada triwulan III pasca Rapat Pra Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen. Perikanan Budi Daya dengan validator dari Biro Perencanaan KKP dan Biro SDMAO KKP, pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023 yang bertempat Ruang Rapat BPKIL Serang. Capaian terhadap Indikator telah terealisasi pada Tahun 2023 sebanyak 8 dokumen yang berasal dari kontribusi Bidang Residu dan Bidang Penyakit Ikan sehingga

capaiannya sebesar 83%.

Capaian tersebut dihitung kumulatif terhadap realisasi NSPK dari tahun 2020 hingga triwulan IV 2023 dengan perolehan 35 dokumen. Sebagai hasil perhitungannya, target renstra diketahui 42 dokumen dan realisasi NSPK sebanyak 35 dokumen sehingga capaian NSPK bidang Kesehatan Ikan yang Disusun hingga triwulan IV tahun 2023 tercapai 83%. Pengukuran indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun sehingga capaian secara keseluruhan baru diketahui pada akhir triwulan IV. Berikut target jumlah NSPK di bidang residu dan bidang Penyakit Ikan.

Tabel 17. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2023

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
1	Bidang Residu	6	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2 dokumen), Prosedur Teknis (1 dokumen), RSN13 (3 dokumen)
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	2	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	Total	8	

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
71	83	116,9	0	0	42 dokumen	71%	0	

Realisasi dokumen NSPK hingga triwulan IV sebanyak 5 dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Prosedur Teknis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tim pengendalian Residu Nasional, 3 Februari 2023;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 63 Tahun 2023 tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2023, 3 Februari 2023;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Surveilans Resistensi Antimikroba;
4. Prosedur Teknis Pengendalian Residu pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi, 29 Mei 2023;
5. Draft Pedoman Strategi Nasional Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Selanjutnya, pembahasan dokumen NSPK lainnya berupa RSNI bidang kesehatan ikan pada rapat konsensus yang telah diselenggarakan secara *online* pada tanggal 12-14 Juni 2023, dengan judul:

1. Deteksi *Aeromonas salmonisida* pada ikan – Bagian 1: Metode *polymerase chain reaction* (PCR), dengan Konseptor yang berasal dari BUSKIPM;
2. Deteksi *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) - Bagian 3: Metode quantitative (real-time) – *polymerase chain reaction* (qPCR) menggunakan hydrolysis, dengan Konseptor yang berasal dari BUSKIPM;
3. Deteksi *Yellow Head Virus* (YHV) genotip 1 – Bagian 3 : Metode quantitative (real-time) reverse transcription – *polymerase chain reaction* (qRT-PCR) menggunakan hydrolysis probe dengan Konseptor yang berasal dari BBPBAP Jepara.

Dokumen RSNI yang telah disepakati pada rapat konsensus telah diproses lebih lanjut di BSN (Badan Standardisasi Nasional) yang baru disahkan 2 (dua) dokumen SNI dengan judul (i) Deteksi *Aeromonas salmonisida* pada ikan – Bagian 1: Metode *polymerase chain reaction* (PCR), pada tanggal 28 Desember 2023 dan (ii) Deteksi *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) - Bagian 3: Metode quantitative (real-time) – *polymerase chain reaction* (qPCR) menggunakan hydrolysis, pada tanggal 18 Desember 2023. Pembiayaan pembahasan RSNI yang dianggarkan sebesar Rp93.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 93.299.900 atau tercapai 100%.

IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%)

Tingkat kualitas implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian residu nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas terhadap kinerja implementasi terhadap NRMP. Pelaksana kegiatan NRMP berada di 26 Provinsi dengan obyek monitoring residu berupa komoditas bandeng, lele, nila, patin, dan udang dengan target sampel monitoring residu secara nasional berjumlah 5.000 sampel. Penanggung jawab indikator kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP berada di Tim kerja NRMP dan NSPK.

Pelaksana kegiatan monitoring residu melalui kegiatan pengambilan sampel hingga pengujian sampel di 26 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Capaian diukur berdasarkan data yang disajikan di dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu (SIMPR) dengan mengukur aspek kesesuaian, kepatuhan dan ketercapaian. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan melakukan penilaian terhadap 3 aspek, sebagai berikut:

1. **Aspek Kesesuaian (bobot 30%)**, yaitu evaluasi kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi:
 - Kesesuaian Target Sampel masing-masing Provinsi (Implementasi – dokumen NRMP)
 - Kesesuaian Target Lokasi monitoring residu pada unit pembesaran dan pembenihan (Implementasi – dokumen NRMP).
2. **Aspek Kepatuhan (bobot 30%)**, yaitu evaluasi terhadap SOP terhadap (a) penginputan data monitoring residu pada aplikasi SIMPR, (b) Kriteria pengambilan sampel dan (c) pemenuhan mekanisme jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian (*Non Compliance*);
3. **Aspek ketercapaian (bobot 40%)**, diukur berdasarkan capaian terhadap target sampel di masing-masing Provinsi.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Target Renstra 2020 – 2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
94	95,05	101,11	-	-	-	94%	101,11	-

Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) merupakan indikator baru ditetapkan pada triwulan III pasca Rapat Pra Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya dengan validator dari Biro Perencanaan KKP dan Biro SDMAO KKP, pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023 yang bertempat Ruang Rapat BPKIL Serang. Indikator tersebut sekaligus merevisi Indikator sebelumnya yaitu Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%). Capaian triwulan IV indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) sebesar 95,05% dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) di 26 Provinsi

No	Provinsi	Komoditas	Aspek Penilaian			Persentase Implementasi NRMP (%)
			Kesesuaian (30%)	Kepatuhan (30%)	Ketercapaian (40%)	
1	Aceh	Udang	30	24.18	40	94.18
2	Sumatera Utara	Udang	30	24	40	94

No	Provinsi	Komoditas	Aspek Penilaian			Persentase Implementasi NRMP (%)
			Kesesuaian (30%)	Kepatuhan (30%)	Ketercapaian (40%)	
		Nilai	30	24	40	94
3	Sumatera Barat	Udang	30	24	40	94
		Nilai	30	27	40	97
4	Riau	Udang	30	27.66	40	97.66
		Patin	30	26.76	40	96.76
5	Jambi	Patin	30	26.09	40	96.09
6	Bangka Belitung	Udang	30	27	40	97
7	Sumatera Selatan	Udang	30	30	40	100.00
		Patin	30	26.31	40	96.31
8	Bengkulu	Udang	30	26.77	40	96.77
9	Lampung	Udang	30	24.24	40	94.24
10	Banten	Udang	30	19.5	40	89.5
11	Jawa Barat	Udang	30	24.47	33.76	88.23
		Lele	30	25.44	40	95.44
		Nilai	30	25.31	40	95.31
12	Jawa Tengah	Udang	30	24.98	40	94.98
		Nilai	30	24.97	40	94.97
13	DI Yogyakarta	Udang	30	24.21	40	94.21
14	Jawa Timur	Udang	30	24.39	40	94.39
		Bandeng	30	24.16	40	94.16
		Nilai	30	24	40	94
		Lele	30	24.56	40	94.56
15	Bali	Udang	30	26.00	40	96.00
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	30	28.67	40	98.67
17	Kalimantan Barat	Udang	30	25.2	40	95.2
18	Kalimantan Selatan	Udang	30	28.09	40	98.09
19	Kalimantan Tengah	Udang	30	24	40	94
		Patin	30	24	40	94
20	Kalimantan Timur	Udang	30	24	40	94
21	Kalimantan Utara	Udang	30	24	40	94
22	Sulawesi Tenggara	Udang	30	29.70	40	99.70
23	Sulawesi Tengah	Udang	30	24	40	94
24	Sulawesi Selatan	Udang	30	24	40	94
		Bandeng	30	24.23	40	94.23
25	Sulawesi Barat	Udang	30	24.29	40	94.29
26	Gorontalo	Udang	30	24	40	94
	Total		1140.00	958.17	1513.76	3611.93
	Nilai IKU Implementasi NRMP		30	25.21	39.84	95.05

Berdasarkan tabel 18 diatas, diketahui bahwa persentase Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan realisasi 100% sedangkan perolehan capaian terendah berada di Provinsi Jawa Barat untuk komoditas Udang. Hal tersebut dipengaruhi aspek ketercapaian memiliki nilai yang rendah diakibatkan realisasi sampel yang belum memenuhi target. Tidak terpenuhinya target sampel diakibatkan tidak tersedianya lokasi pengambilan sampel yang memenuhi kriteria. Meskipun demikian secara total sampel yang dialokasikan di Provinsi Jawa Barat telah melampaui target alokasi sampel.

Indikator kinerja monitoring residu yang dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2023 berjumlah 18.000 sampel, namun target sampel tersebut mengalami penurunan menyesuaikan ketersediaan anggaran dekonsentrasi di 26 Provinsi. Pada tahun 2023, secara jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 5.000 sampel dengan capaian hingga akhir triwulan IV mencapai 5.148 sampel atau 102.96% dari target tahunan. Rincian jumlah sampel yang dapat dicapai di masing-masing Provinsi dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu Tahun 2023 di 26 Provinsi

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Aceh	Udang	170	172	101.18
2	Sumatera Utara	Udang	120	127	105.83
		Nila	56	56	100.00
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	100.00
		Nila	36	41	113.89
4	Riau	Udang	22	35	159.09
		Patin	52	52	100.00
5	Jambi	Patin	53	53	100.00
6	Bangka Belitung	Udang	57	59	103.51
7	Sumatera Selatan	Udang	166	174	104.82
		Patin	67	67	100.00
8	Bengkulu	Udang	40	40	100.00
9	Lampung	Udang	409	418	102.20
10	Banten	Udang	44	44	100.00
11	Jawa Barat	Udang	539	453	84.04
		Lele	139	185	133.09
		Nila	91	137	150.55
12	Jawa Tengah	Udang	176	187	106.25
		Nila	88	88	100.00
13	DI Yogyakarta	Udang	40	40	100.00
14	Jawa Timur	Udang	406	426	104.93
		Bandeng	106	114	107.55

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
		Nila	107	122	114.02
		Lele	105	111	105.71
15	Bali	Udang	55	57	103.64
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	497	503	101.21
17	Kalimantan Barat	Udang	58	61	105.17
18	Kalimantan Selatan	Udang	80	80	100.00
19	Kalimantan Tengah	Udang	5	5	100.00
		Patin	35	39	111.43
20	Kalimantan Timur	Udang	118	118	100.00
21	Kalimantan Utara	Udang	92	98	106.52
22	Sulawesi Tenggara	Udang	316	323	102.22
23	Sulawesi Tengah	Udang	168	168	100.00
24	Sulawesi Selatan	Udang	190	194	102.11
		Bandeng	94	98	104.26
25	Sulawesi Barat	Udang	101	101	100.00
26	Gorontalo	Udang	82	82	100.00
			5000	5148	102.96

Capaian indikator hingga triwulan IV telah mencapai 102.96 % yang disebabkan 17 Provinsi mendapat sampel tambahan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dekonsentrasi sebanyak 149 sampel yang terdistribusi di : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) telah dilakukan beberapa rencana aksi, seperti : (i) Penyusunan *annual report* 2022 dan *National residu monitoring plan* (NRMP) 2023 yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2023, pada tanggal 3 Februari 2023 (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 63 Tahun 2023 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2023, pada tanggal 3 Februari 2023.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan *official control* pengendalian residu tahun 2023 sebesar Rp 141.000.000 namun pada triwulan II dialihkan ke kegiatan prioritas sebesar Rp 43.000.000,-, sehingga anggaran *official control* pengendalian residu menjadi Rp 98.000.000. Selanjutnya pada triwulan IV terdapat revisi anggaran official control menjadi Rp 106.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 105.605.300 sehingga telah terserap sebesar 99,16%.

IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada triwulan III menggantikan Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Penyakit Ikan. Penyesuaian indikator tersebut pasca Rapat Pra Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya dengan validator dari Biro Perencanaan KKP dan Biro SDMAO KKP, pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023 yang bertempat Ruang Rapat BPKIL Serang.

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan didefinisikan tingkat serangan penyakit ikan pada wilayah tertentu yang ditunjukkan dengan warna hijau, kuning dan merah pada peta sebaran penyakit ikan. Tingkat serangan penyakit ikan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan monitoring penyakit ikan yang dilakukan di 34 Provinsi yang dilaporkan oleh operator SSMPI Dinas Perikanan Provinsi melalui SSMPI online. Jumlah sampel penyakit ikan yang dimonitor untuk mengetahui tingkat serangan penyakit ikan sebanyak 750 sampel.

Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Penghitungan indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan bersifat maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi semakin baik.

Tabel 22. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
1	Berat	≥ 60 %	Merah	1
2	Sedang	30 – 60 %	Kuning	2
3	Ringan	≤ 30 %	Hijau	3

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Indeks serangan penyakit ikan (Skala)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW II 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
2	3	>120	-	-	-	2	3	-

Monitoring penyakit ikan melalui anggaran Dekonsentrasi pada tahun 2023 dialokasikan kepada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2023 diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring penyakit ikan yang selanjutnya realisasi indeks serangan penyakit ikan sebesar 3 yang menunjukkan pengendalian penyakit ikan telah berjalan dengan baik karena tingkat serangan penyakit rendah.

Berdasarkan tingkat serangan penyakit ikan terdapat 1 (satu) tingkat serangan penyakit ikan berat dengan nilai skala 1 (satu), terdapat 2 (dua) tingkat serangan penyakit ikan sedang dengan nilai skala 2 (dua) dan terdapat 10 (sepuluh) tingkat serangan penyakit ikan ringan dengan nilai skala 3 (tiga).

Tabel 24. Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) Tahun 2023

No	Penyakit Ikan	Jumlah sampel	Positif	Negatif	Prosentase (%)	Tingkat Serangan	Skala
1	Decapod Iridescent Virus 1	1	1	0	100	Berat	1
2	Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)	3	1	2	33.33	Sedang	2
3	Vibriosis	9	3	6	33.33	Sedang	2
4	Hepatopancreatic microsporidiosis	32	9	23	28.13	Ringan	3
5	Viral encephalopathy and retinopathy (VNN/VER)	50	7	43	14	Ringan	3
6	Enteric septicemia of catfish (ESC)	68	8	60	11.76	Ringan	3
7	Motil Aeromonas septicemia (MAS)	169	19	150	11.24	Ringan	3
8	Tilapia lake virus disease (TiLV)	77	8	69	10.39	Ringan	3
9	Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)	94	6	88	6.38	Ringan	3
10	Infection with Megalocytivirus (Grouper sleepy disease iridovirus-GSDIV)	64	4	60	6.25	Ringan	3
11	Infection with infectious myonecrosis (IMNV)	35	2	33	5.71	Ringan	3
12	Infection with white spot syndrome virus (WSSV)	135	7	128	5.19	Ringan	3
13	Streptococcosis (<i>Streptococcus agalactiae</i>)	82	3	79	3.66	Ringan	3
14	Infection with koi herpesvirus (KHV)	58	0	58	0	-	-
15	Red sea bream iridoviral disease	4	0	4	0	-	-
16	Edwardsiellosis	11	0	11	0	-	-

No	Penyakit Ikan	Jumlah sampel	Positif	Negatif	Prosentase (%)	Tingkat Serangan	Skala
17	Streptococcosis (<i>Streptococcus iniae</i>)	13	0	13	0	-	-
18	Fish mycobacteriosis (<i>Mycobacterium fortuitum</i>)	15	0	15	0	-	-
19	Furunculosis	6	0	6	0	-	-
20	Ichthyophthiriasis	45	0	45	0	-	-
TOTAL		971	78	893		-	

Monitoring penyakit ikan dilakukan melalui anggaran Dekonsentrasi di 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan dilakukan terhadap 20 penyakit ikan yaitu *Infection with Decapod Iridescence virus-1*, *infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHNNV)*, vibriosis, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM-EHP)*, *Viral encephalopathy and retinopathy (VER/VNN)*, *Enteric septicemia of catfish (ESC)*, *Motil Aeromonas septicemia (MAS)*, *Tilapia lake virus disease (TiLV)*, *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Infection with Megalocytivirus (Grouper sleepy disease iridovirus-GSDIV)*, *Infection with infectious myonecrosis (IMNV)*, *Infection with white spot syndrome virus (WSSV)*, *Streptococcosis (Streptococcus agalactiae)*, *Infection with koi herpesvirus (KHV)*, *Red sea bream iridoviral disease*, *Edwardsiellosis*, *Streptococcosis (Streptococcus iniae)*, *Fish mycobacteriosis (Mycobacterium fortuitum)*, *Furunculosis*, dan *Ichthyophthiriasis (Ichthyophthirius multifiliis)*.

Pelaksanaan surveilan/monitoring penyakit ikan dilakukan di 34 provinsi dengan target sampel yang diambil dan diuji sebanyak 750 sampel. Jumlah sampel yang diambil dan diuji tahun 2023 berjumlah 917 sampel atau sebesar 129,46% dari target tahun 2023. Secara detail jumlah sampel untuk setiap provinsi yang direncanakan pada tahun 2023 dan realisasi sampel tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase (%)
1	Aceh	15	15	100
2	Sumatera Utara	25	25	100
3	Sumatera Barat	35	61	174,29
4	Riau	20	20	100
5	Bengkulu	30	30	100
6	Kepulauan Riau	30	45	150
7	Jambi	35	31	88,57
8	Sumatera Selatan	25	19	76
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	75	300

No	Provinsi	Target Tahun2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase (%)
10	Lampung	25	27	108
11	Banten	10	10	100
12	DKI Jakarta	25	59	236
13	Jawa Barat	60	79	131,67
14	Jawa Tengah	60	78	130
15	DI Yogyakarta	40	43	107,5
16	Jawa Timur	20	20	100
17	Bali	10	10	100
18	Nusa Tenggara Barat	25	31	124
19	Nusa Tenggara Timur	10	10	100
20	Kalimantan Barat	10	27	270
21	Kalimantan Tengah	10	11	110
22	Kalimantan Timur	10	16	160
23	Kalimantan Utara	25	26	104
24	Kalimantan Selatan	20	26	130
25	Sulawesi Utara	10	10	100
26	Sulawesi Selatan	15	19	126,67
27	Sulawesi Tengah	20	24	120
28	Gorontalo	15	15	100
29	Sulawesi Tenggara	15	18	120
30	Sulawesi Barat	15	27	180
31	Maluku Utara	15	15	100
32	Maluku	15	19	126,67
33	Provinsi Papua	15	15	100
34	Papua Barat	15	15	100
Total		750	971	129,46

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala) adalah (1) terdapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang melakukan pengujian sampel berbeda dengan yang telah dialokasikan, dan (2) adanya perubahan jenis penyakit yang diuji dikarenakan ketidakterediaan kit pengujian untuk penyakit tersebut di laboratorium uji. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi melalui media sosial dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait pelaksanaan monitoring penyakit ikan tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan pendampingan pengendalian penyakit ikan tahun 2023 sebesar Rp230.000.000 dengan serapan sebesar Rp 229.999.910,- atau 99,99%.

IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)

Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang resistan terhadap antimikroba (%) mengalami penyesuaian menjadi Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) pada triwulan III. Penyesuaian indikator tersebut pasca Rapat Pra Validasi Tim Kerja Lingkup Ditjen. Perikanan Budi Daya dengan validator dari Biro Perencanaan KKP dan Biro SDMAO KKP, pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023 yang bertempat di Ruang Rapat BPKIL Serang. Sumber data indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) berasal dari Tim Kerja Pengendalian Penyakit Ikan dan Resistensi Antimikroba. Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) telah ditetapkan sejak tahun 2022, yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi BPK terkait dengan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistensi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Pengujian resistensi antimikroba dilaksanakan di 15 UPT- DJPB dengan target indikator kinerja sebesar 35%. Penghitungan indikator kinerja Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) diukur pada akhir tahun dan bersifat minimize yang menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat resistensi antimikrobanya maka semakin bagus pengendalian resistensi antimikrobanya. Jumlah sampel ikan yang diuji untuk mengetahui hasil uji yang resisten terhadap antimikroba sebanyak 1.060 sampel.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2023

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW M 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
35	14.33	>120	-	-	-	35%	-	-

Realisasi persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) sebesar 14,33% diperoleh dari rata-rata nilai resistensi bakteri *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio alginolyticus*, *Aeromonas hydrophila* dan *Escherichia coli*. Data dukung pencapaian realisasi persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Bakteri Patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2023

No	Bakteri	Jumlah sampel positif	Jumlah sampel Resistan ENR	Jumlah sampel Resistan TE	Jumlah sampel Resistan OTC	Resistensi ENR (%)	Resistensi TE (%)	Resistensi OTC (%)
1	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	129	19	12	10	14,73	9,30	7,75
2	<i>Vibrio alginolyticus</i>	115	1	3	5	0,87	2,61	4,35
3	<i>Aeromonas hydrophila</i>	52	5	9	11	9,62	17,31	21,15
4	<i>Escherichia coli</i>	108	17	37	37	15,74	34,26	34,26
Total		404	42	61	63			
Rata-rata resistensi						10,24	15,87	16,88
Capaian Indikator Kinerja								14,33

Tabel 28. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Tahun 2023 di 15 UPT-DJPB

No	UPT DJPB	Target sampel	Realisasi sampel	Persen tase (%)
1	BBPBAT Sukabumi	100	238	238
2	BBPBAP Jepara	100	120	120
3	BBPBL Lampung	86	94	109,3
4	BPBAT Sungai Gelam	51	79	154,9
5	BPBAT Mandiangin	51	72	141,2
6	BPBAT Tatelu	31	38	122,6

No	UPT DJPB	Target sampel	Realisasi sampel	Persen tase (%)
7	BPBAP Ujung Batee	51	56	109,8
8	BPBAP Situbondo	80	82	102,5
9	BPBAP Takalar	51	73	143,1
10	BPBL Batam	50	63	126
11	BPBL Lombok	51	47	92,2
12	BPBL Ambon	51	78	152,9
13	BPIUUK Karangasem	51	57	111,8
14	BLUPPB Karawang	80	82	102,5
15	BPKIL Serang	176	370	210,3
Total		1060	1.549	146,13

Persentase realisasi sampel tertinggi dicapai oleh BBPBAT Sukabumi dengan realisasi sebesar 238% dan terendah BPBL Lombok sebesar 92,2%. Secara komoditas, persentase realisasi sampel paling tinggi adalah sampel air sebesar 283,33% dan terendah adalah sampel bawal sebesar 95,92%.

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) yaitu (1) terdapat komoditas sampel yang tidak terealisasi dan (2) terdapat sampel yang hasil identifikasi bakterinya menunjukkan hasil negatif bakteri target. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan UPT DJPB agar UPT memastikan kembali metode uji identifikasi bakteri yang ada di UPT tersebut. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka NSPK bidang AMR tahun 2023 sebesar Rp 110.000.000 dengan serapan sebesar Rp 109.999.820,- atau 99,99%.

SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

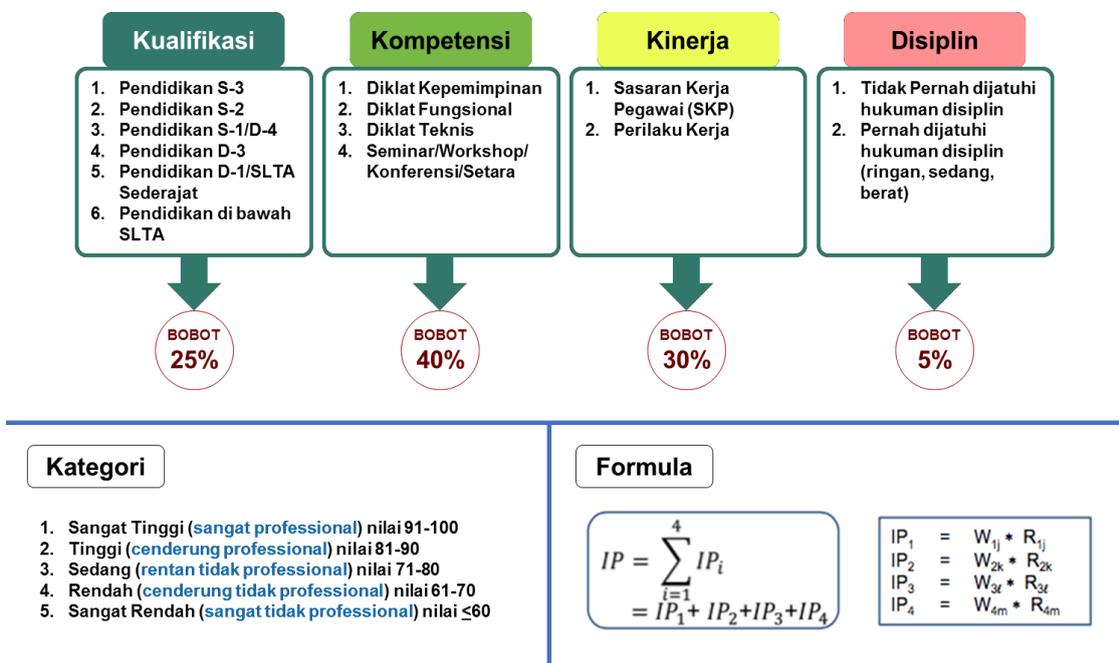
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu

sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;

2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pengukuran capaian IP ASN dilakukan pada semester 2 dan semester 4 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada akhir semester.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 - 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
81	83,07	102,55	83,66	100,71	74	81	102,55	117

Pada Renstra DJPB 2020-2024, telah dicantumkan target IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) sebesar 74, namun target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih besar yaitu 81. Hasil penilaian IP ASN di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada semester sebelumnya tercapai 67,97% yang diperoleh dari komponen IP ASN berupa: a) Kualifikasi dengan nilai 15,41; b) Kompetensi dengan nilai 22,56; c) Kinerja dengan nilai 25 dan d) Disiplin dengan nilai 5,0. Pada semester II, perolehan IKU Indeks profesionalitas ASN pada semester II diperoleh capaian sebesar 83,07 dengan rincian komponen IP ASN meliputi: a) Kualifikasi dengan nilai 21.74; b) Kompetensi: 31,33; c) Kinerja: 25 dan Disiplin: 5,00. Perbandingan perolehan nilai IP ASN tahun 2023 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN Semester II Tahun 2023 Lingkup DJPB

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1	Sekretariat DJPB	20.98	39.17	25.00	5.00	90.16	Tinggi
2	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21.74	31.33	25.00	5.00	83.07	Tinggi
3	Dit Perbenihan	21.61	33.31	25.00	5.00	84.91	Tinggi
4	Dit Pakan dan Obat Ikan	21.28	34.72	25.00	5.00	86.01	Tinggi
5	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	22.06	31.43	25.00	5.00	83.49	Tinggi

IKM. 12. Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
100	100	100	100	100	1	100	100	100

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)” belum terealisasi pada triwulan III dikarenakan pengukuran capaian IKU tersebut baru diketahui pada akhir tahun. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 Juni 2023 (Triwulan II Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2022 (Triwulan III 2023).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan II Tahun 2023 lingkup DJPB sebesar 100 % (tuntas). Capaian indikator “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” disampaikan melalui Surat Nomor : B. 142/DJPB.1/IKU.130/I/2024, 8 Januari 2023 perihal Capaian IKU “Persentase Penyelesaian LHP BPK” dengan hasil perbandingan capaian Kinerja di masing-masing satker lingkup DJPB sebagai berikut :

Tabel 32. Perbandingan Persentase Penyelesaian LHP BPK Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2022	Temuan yang Diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	3.601.915.382	3.601.915.382	100	-
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	-	-	100	-
3	Direktorat Produksi	-	-	100	-

	dan Usaha Budi Daya				
4	Direktorat Perbenihan	-	-	100	-
5	Sesditjen Perikanan Budi Daya	-	-	100	-
	Total	3.601.915.382	3.601.915.382	100	-

IKM. 13. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerja.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) Tahun 2023

Nama SS Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
75	58,05	77,4	-	-	-	75	58,05	-

Pada Triwulan IV, indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) belum memenuhi target berdasarkan hasil penilaian LKE yang dirilis pada memorandum Nomor: 2604/DJPB.1/HP.440/XI/2023, 8 November 2023 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 dengan perbandingan diantara Unit Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai berikut :

Tabel 34. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Nilai PM	Kategori
1	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	58,05	CC
2	Direktorat Produksi dan Usaha	56,65	CC
3	Direktorat Perbenihan	64,05	B
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	73,15	BB
5	Sekretariat Direktorat Jenderal	59,05	CC

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan IV Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan.

$$\text{Pengukuran Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan}} \times 100\%$$

Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW 2023			Realisasi TW 2022	Perbandingan Realisasi 2023 thd 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra20 20-2024
Target	Realisasi	Capaian						
75	100	>120	100	>120	70	75	>120	>120

Pada renstra DJPB 2020-2024 terdapat penetapan target IKU Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) pada tahun 2022 sebesar 70.

Capaian IKU diperoleh pada triwulan IV berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Surat Nomor: B. 43/DJPB.1/HP.620/I/2023, 3 Januari 2023 pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV 2023).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan IV Tahun 2023 pada unit kerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar 100 % dari 26 jumlah rekomendasi. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada tabel 36 berikut ini.

Tabel 36. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi
1	Setditjen Perikanan Budidaya	129	115	89,15	14
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	9	9	100.00	0
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	26	26	100.00	0
4	Direktorat Perbenihan	17	17	100.00	0
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	0	0	100.00	0

IKM.15. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
92	133,33	>120	100	100	86	92	>120	116,28

Target IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB 2020- 2024, dengan nilai sebesar 86%. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup DJPB dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory dengan pembobotan 20%; (ii) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dengan pembobotan 40% serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP dengan pembobotan 40%.

Pada triwulan IV tahun 2023, target indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan ditargetkan angka 86 dengan realisasi 133,33 atau sebesar 155,035%. Upaya yang dilakukan terhadap tercapainya target diatas melalui: penyebaran informasi menggunakan aplikasi melalui laman <https://portal.kkp.go.id> (dengan mekanisme dan perhitungan yang disampaikan melalui Memorandum Nomor: 1996/DJPB.1/TU.210/VIII/2023, 30 Agustus 2023 tentang

Penyampaian Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan III Lingkup KKP. Penggunaan aplikasi tersebut menggantikan aplikasi Bitrix yang telah habis lisensinya pada tanggal 25 Juni 2023.

Adapun pegawai yang wajib aktif dan mendapat nilai yaitu Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja lingkup KKP yang sudah di validasi oleh Biro SDMAO, akan tetapi pada triwulan III pegawai yang wajib melakukan pengisian di aplikasi *Collaboration Office* yaitu Eselon II. Sebagai dasar penilaian maka komponen yang digunakan yaitu keaktifan dengan capaian sebesar 100%. Guna mempertahankan capaian IKU tersebut, maka dilakukan upaya mengingatkan pegawai yang diwajibkan mengisi aplikasi diatas agar berpartisipasi secara aktif dalam melakukan upload dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi maupun share informasi karya tulis secara rutin.

Berkaitan dengan perbandingan pencapaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan Triwulan IV telah diinformasikan melalui Memorandum: 27/DJPB.1/TU.210/I/2024, 4 Januari 2023 perihal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan IV Tahun 2023. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Eselon II Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah melampaui target Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan nilai yang sama juga diperoleh Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya kecuali Sekretariat jenderal Perikanan Budi Daya dengan perolehan 116,67%.

IKM.16. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 38. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
77.5	94.83	122.36	94.39	99.54	85	85		111.56

IKU Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan target pada tahun 2023 sebesar 75%. Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam

hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada Tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektifitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penghitungan capaian IKU Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan tahunan. Hasil penilaian pemanfaatan bantuan pemerintah disampaikan melalui memorandum Nomor: 433 /ITJ/HP.410/XI/2023, 3 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP TA 2023. Berikut capaian penilaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup DJPB. Evaluasi dilaksanakan secara uji petik pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023 oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan melibatkan Penyuluh Perikanan terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah TA 2022 Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur.

Tabel 39. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022

Jenis Bantuan	Penanggung Jawab	Jumlah		Skor			Total
		Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	
Mesin Pakan Ikan	Dit. Pakan dan Obat Ikan	40	40	68.88	9.38	4.75	83.00
Karamba Jaring Apung (KJA)	Dit. Perbenihan	13	13	80.00	10.00	3.46	93.46
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	Dit. Produksi dan Usaha Budidaya	59	55	54.82	9.73	5.73	70.27
Excavator	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	5	5	74.00	10.00	10.00	94.00
Pengelolaan Irigasi	Dit Kawasan dan	10	10	80.00	9.00	8.00	97.00

Jenis Bantuan	Penanggung Jawab	Jumlah		Skor			Total
		Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	
Tambah Partisipatif (PITAP)	Kesehatan Ikan						
Kincir	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	10	10	78.00	10.00	5.50	93.50

IKM.17. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun 2023, Capaian indikator kinerja tersebut terdiri dari kegiatan arsiparis, rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 6 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur setiap triwulannya. Pengukuran dilakukan terhadap 6 aspek dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Nilai pengawasan arsiparis = 65%
- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 100
- Pengelolaan BMN = 100%
- Layanan tata usaha = 75%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 82%

Tabel 40. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
85	94.13	110.74	-	-	-	85	94.13	110.74

IKU Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) belum ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian indikator tersebut pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 110.74%. Perolehan angka capaian tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Tahun 2023

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Nilai pengawasan arsiparis	65	75,98
2	Kehadiran pegawai	85	98,79
3	Pengelolaan Keuangan	100	100
4	Pengelolaan BMN	100	100
5	Layanan tata usaha	75	100
6	Pengelolaan SDM Aparatur	82	90
TOTAL		85	94.13

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada Triwulan IV tahun 2023, meliputi :

- **Nilai Pengawasan Arsiparis**

a) Nilai pengawasan arsiparis diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif, dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian nilai pengawasan arsiparis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75,98% berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Surat Nomor : B.113/DJPB.1/TU.140/I/2024, 5 Januari 2024. Penghitungan Nilai Pengawasan Arsiparis merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aspek penilaian, terdiri dari : (i) Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), dan (ii) Sumberdaya Kearsipan (SDK). Perbandingan nilai arsiparis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 42. Hasil Verifikasi Penilaian Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Kantor Pusat Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023

No	Unit Pengolah Kantor	Nilai Aspek PAD	Nilai Aspek SDK	Total Nilai Aspek	Kategori	Pemeringkatan Tingkat KKP	Pemeringkatan di Lingkup Kantor Pusat Eselon 1
1	Sesditen PB	40.24	49.08	98.32	AA	3	1
2	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	42.59	33.39	75.08	BB	34	5
3	Dit.	43.82	46.17	89.98	A	19	2

No	Unit Pengolah Kantor	Nilai Aspek PAD	Nilai Aspek SDK	Total Nilai Aspek	Kategori	Pemeringkatan Tingkat KKP	Pemeringkatan di Lingkup Kantor Pusat Eselon 1
	Perbenihan						
4	Dit. Pakan dan Obat Ikan	46.76	32.82	79.59	BB	31	4
5	Dit. Produksi dan Usaha	47.37	32.83	80.21	A	29	3

Keterangan :

AA : Sangat Memuaskan

BB : Sangat Baik

A : Memuaskan

b) Telah dilakukan inventarisasi dokumen usul musnah. Terdapat 15 karung dokumen usul musnah yang akan diproses ke Sekretariat DJPB. Selain itu juga dilaksanakan inventarisasi dokumen inaktif. Terdapat 33 dus arsip inaktif dengan cakupan waktu 2013-2018.

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Jumlah Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2023 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 11 (sebelas) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada Triwulan IV tahun 2023 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

Tabel 43. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023

No	Kelompok/ Bidang	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran				Persentase Kehadiran
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar	Jumlah	
1	Penataan Kawasan	10	63	630	170	397	63	630	100,00%
2	Residu	8	63	504	270	215	0	485	96,23%
3	Hama dan Penyakit Ikan	9	63	567	191	310	63	564	99,47%
4	Sarana dan Prasarana	10	63	630	164	466	0	630	100,00%
5	Tata Usaha	14	63	882	350	506	0	856	97,05%
6	JFT	1	63	63	48	15	0	63	100,0%
	Total	52		3.276	1.193	1.909	126	3.228	
	Persentase (%)								98,79%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kehadiran masih dibawah dari target kehadiran 100% yang dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sakit dan cuti. Gambaran jumlah pegawai yang tidak hadir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023

No	Kelompok/Bidang	Jumlah Pegawai	Ketidakhadiran (hari)				Jumlah (Hari)	Persentase ketidakhadiran (%)
			Sakit	Cuti	Izin	Alpa		
1	Penataan Kawasan	10	0	0	0	0	0	0,00 %
2	Residu	8	1	19	0	0	20	3,97%
3	Hama dan Penyakit Ikan	9	0	3	0	0	3	0,53%
4	Sarana dan Prasarana	10	0	0	0	0	0	0,00%
5	Tata Usaha	14	19	7	0	0	26	2,95%
6	JFT	1	0	0	0	0	0	0,00%
	Total	52	20	29	0	0	49	
	Persentase (%)							1,24%

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pada Triwulan IV Tahun 2023, pengelolaan keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dapat dirinci pada Tabel 45.

Tabel 45. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023

No	Proses Pembayaran	Kuantitas (Dokumen)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Jumlah SPM -LS			
	SPM LS Bendahara	57	3.490.785.800	100,00 %
	SPM LS Pihak Ketiga	39	64.833.884.162	100,00 %
2	Jumlah GUP	1	50.000.000	100,00 %
3	Jumlah TUP	1	302.960.000	100,00 %
	Jumlah Dokumen Pengajuan Pembayaran	98	68.677.629.962	
	Prosentase (%)			100,00 %

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2023. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 46. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan IV Tahun 2023

No	Akun	Kuantitas	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Barang Konsumsi (unit)	35	350.000	100%
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	188	230.736.411.000	100%
3	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	100%
	Prosentase (%)			100,00 %

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat. Pada Triwulan IV tahun 2023, telah direalisasikan kegiatan tersebut dengan rincian pada tabel 47 berikut.

Tabel 47. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan IV Tahun 2023

No	Kelompok/Bidang	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
1	Penataan Kawasan	7	7	100,00 %
2	Residu	1	1	100,00 %
3	Hama dan Penyakit Ikan	1	1	100,00 %
4	Sarana dan Prasarana	2	2	100,00 %
5	Tata Usaha	0	0	100,00 %
	Total	11	11	
	Persentase			100,00 %

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan disampaikan melalui Surat Nomor : B.213/DJPB.1/KP.720/I/2024, 10 Januari 2024 dengan realisasi sebesar 90% dengan target 82%, kategori perolehan capaian tersebut termasuk diatas rata-rata. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen

- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses

ketatausahaan yang diverifikasi.

c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Perbandingan indeks pengelolaan SDM Aparatur dan Perolehan nilai capaian tersebut Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 48. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM				Predikat	Level
		Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian	Jumlah		
1	Sekretariat DJPB	37,42	30,00	30,00	97,42	Sangat Baik	6
2	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	30,00	30,00	30,00	90,00	Diatas Rata-Rata	4
3	Dit Perbenihan	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6
4	Dit Pakan dan Obat Ikan	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6
5	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6

IKM.18. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) tidak ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 sehingga indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dikelola pada Tahun 2023. Penanggung Jawab Indikator Kinerja tersebut berada di Kelompok Sarana dan Prasarana dan Kelompok Penataan Kawasan.

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) merupakan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan) yang dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

Perhitungan indikator Perhitungan indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) berdasarkan Jumlah Kusuka yang mendapat bantuan dan terdaftar KUSUKA dibandingkan dengan pelaku usaha budi daya ikan yang menerima bantuan yang hasil pengukurannya baru diketahui pada Triwulan IV.

Tabel 49. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	123.51	>120	-	0	-	80	0	0

Target Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) difokuskan pada kegiatan bantuan pemerintah, berupa: excavator, kincir dan PITAP dengan target KUSUKA di masing-masing bantuan pemerintah, yaitu: 496 orang, 2,680 orang dan 440 orang. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) dapat dilihat pada Tabel 50 berikut.

Tabel 50. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2023

No	Kegiatan	Jumlah Bantuan		Jumlah Penerima Bantuan (Orang)		Persentase (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Bantuan Excavator	62	64	496	1,240	250
2	Bantuan Kincir	670	657	2,680	2,628	98
3	PITAP	55	55	440	598	136
	TOTAL			3,616	4,466	123.51

IKM.19. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2023 sehingga indikator tersebut tidak dicantumkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Kawasan perikanan budi daya (tambak) yang dipetakan secara geospasial di Provinsi Sumatera Selatan dan NTB. Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang pengukurannya dihitung

berdasarkan jumlah rencana aksi yang diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan rencana aksi yang dipersentasekan. Indikator kinerja tersebut diukur secara tahunan yang seluruhnya telah tercapai sebesar 100%.

Tabel 51. Capaian Indikator Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
100	100	100	-	0	-	100	0	0

Penyusunan informasi geospasial tambak dilakukan dengan cara interpretasi visual pada citra satelit yang menjadi sumber data. Interpretasi visual adalah metode pengenalan karakteristik objek berdasarkan unsur interpretasi dari citra satelit komposit. Objek yang telah dikenali melalui proses interpretasi visual kemudian dilakukan proses deliniasi, atau menarik batas terluar dari objek tersebut untuk dipisahkan dengan objek yang lain sesuai dengan klasifikasi objek yang telah dikenali. Berikut merupakan capaian yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kawasan tambak, yaitu :

1. Nusa Tenggara Barat

- Luas tambak Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini yang telah selesai dikerjakan sebesar 9.826,41 ha, dengan jumlah petak tambak yang teridentifikasi sebanyak 18.504 petak tambak di dalam kawasan tambak;
- Lokasi tambak berada di 9 Kabupaten dan tambak terluas berada di Kabupaten Sumbawa dengan luasan sebesar 3.399,75 ha. 3.
- Klasifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tambak sederhana seluas 8.915,00 ha dengan jumlah petak 16.449, tambak semi-intensif seluas 112,95 ha dengan jumlah petak 233, dan tambak intensif 798,46 ha dengan jumlah petak 1.822.

2. Sumatera Selatan

- Luas tambak Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini yang telah selesai dikerjakan sebesar 44.150,29 ha, dengan jumlah petak tambak yang teridentifikasi sebanyak 26.798 petak tambak. Sedangkan luas tambak Provinsi Lampung sebesar 23.954,56 ha, dengan jumlah petak tambak yang teridentifikasi sebanyak 52.088 petak.
- Lokasi tambak di Provinsi Sumatera Selatan berada di 2 Kabupaten dan tambak terluas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan sebesar 39.376,93 ha. Sedangkan di Provinsi Lampung tambak berada di 7 Kabupaten dan tambak terluas berada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luasan sebesar 13.652,98 ha
- Klasifikasi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tambak sederhana seluas 43.650,85 ha dengan jumlah petak 25.442, tambak semi-intensif seluas 212,77 ha dengan jumlah petak 624, dan tambak intensif 286,66 ha dengan jumlah petak 732.

Sedangkan klasifikasi di Provinsi Lampung memiliki tambak sederhana seluas 22.238,07 ha dengan jumlah petak 47.135, tambak semiintensif seluas 293.03 ha dengan jumlah petak 1.469, dan tambak intensif 1.423,46 ha dengan jumlah petak 3,484.

IKM.20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Indikator kinerja persentase realisasi keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada Tahun 2023 yang didefinisikan sebagai tingkat serapan anggaran di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Kawasan dan kesehatan ikan dibandingkan dengan pagu anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Alokasi anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2023 sebesar 241. 519.089.000 yang diimplementasikan untuk mencapai Indikator Kinerja di setiap unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan rincian: (a) Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 602.000.000; (b) Bantuan Peralatan/Sarana sebesar Rp. 83.758.200.000; (c) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.350.000.000; dan (d) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 152.808.889.000. Pagu anggaran mengalami perubahan dibandingkan dengan anggaran yang tercantum di Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang sebelumnya sebesar Rp 203.986.055.000,00.

Tabel 52. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW IV 2023			Realisasi TW IV 2022	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
98	99.42	101.45	99.96	99.45	-	98	99.42	0

Persentase realisasi keuangan Dit. KKI sudah mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2023. Seluruh kegiatan telah terealisasi seluruhnya di Triwulan IV meliputi Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Bantuan Peralatan/Sarana, Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan, Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase realisasi keuangan Dit. KKI sebesar 99,42% sudah melebihi dari target 98%. Kedepannya diharapkan agar pencapaian maksimal realisasi dapat tersebar di masing-masing bulan dan tidak menumpuk di akhir tahun. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan survey calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan dengan lebih awal, mempercepat proses birokrasi SK penerima bantuan, mempercepat proses pengadaan dan penyelesaian BAST dengan segera.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan dan kesehatan ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2023. Terdapat perbedaan target antara target yang tercantum pada Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2023. Selanjutnya capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan. Berdasarkan target tahunan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2023, dari total 20 (dua puluh) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 15 (lima belas) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 4 (empat) Indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target tahunan dan 1 (satu) indikator kinerja yang masih di bawah target. Selanjutnya, perkembangan tindaklanjut atas rekomendasi triwulan III dalam menunjang kinerja triwulan IV, yaitu:

Tabel 41. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2023

No	Rekomendasi TW III	Tindak Lanjut yang dilakukan pada Triwulan IV
1	Mendorong penyelesaian pembangunan kluster tambak udang dan bandeng	Melanjutkan pembangunan kluster baik terkait dengan konstruksi, pemasangan instalasi listrik, bangunan pendukung, dan melakukan penebaran benih.
2	Mendorong penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian kendala di lapangan dalam pembangunan BUBK Tahap II	Pelaksanaan paket 2 telah mencapai 100% yang ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima pekerjaan PHO (<i>Provisional Hand Over</i>) pada tanggal 15 Desember 2023, dengan item pekerjaan meliputi : pekerjaan sarana pendukung intake laut, pekerjaan konstruksi bangunan area kantor (penanganan abrasi), dan pekerjaan mekanikal elektrikal (ME).
3	Komunikasi dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penerima	Mengkomunikasikan dengan kelompok terkait kelengkapan usulan dan solusi yang dapat dilaksanakan.

No	Rekomendasi TW III	Tindak Lanjut yang dilakukan pada Triwulan IV
	bantuan	
4	Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan agar segera melakukan perencanaan pengambilan sampel di awal Triwulan IV serta menyampaikan hasil pelaksanaan pengendalian residu agar Dinas KP memperhatikan kegiatan pengambilan sampel residu sesuai ketentuan.	Telah disampaikan surat pelaksanaan monitoring residu triwulan IV melalui Surat Nomor : B.54/DJPB.2/PB.240/I/2024, 8 Januari 2024 tentang Hasil Pelaksanaan Pengendalian Residu Triwulan IV Tahun 2023.
5	Berkoordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam kegiatan surveilan/monitoring penyakit ikan dan <i>antimicrobial resistensi</i> (AMR)	Telah dilaksanakan koordinasi dengan UPT DJPB terkait pelaksanaan monitoring penyakit ikan dan surveillance <i>antimicrobial resistance</i> (AMR).